

Lampiran 1. DTD Undang-undang Republik Indonesia Berbasis XML

```
<!ELEMENT DOKUMEN (JUDUL, PEMBUKAAN, BATANG_TUBUH, PENUTUP)>
  <!ATTLIST DOKUMEN TIPE ID #REQUIRED
    ID ID #REQUIRED>

<!ELEMENT JUDUL (NOMOR, TAHUN, NAMA_PERATURAN)>
  <!ELEMENT NAMA_PERATURAN (#PCDATA)>

<!ELEMENT PEMBUKAAN (FRASE_SYUKUR, PEJABAT_PEMBUAT, KONSIDERANS,
DASAR_HUKUM, DIKTUM)>
  <!ELEMENT FRASE_SYUKUR (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PEJABAT_PEMBUAT (#PCDATA)>
  <!ELEMENT KONSIDERANS (KALIMAT|HURUF)>
    <!ATTLIST KONSIDERANS ID ID #REQUIRED>
  <!ELEMENT DASAR_HUKUM (KALIMAT|ANGKA)>
    <!ATTLIST DASAR_HUKUM ID ID #REQUIRED>
  <!ELEMENT DIKTUM (PERSETUJUAN, MEMUTUSKAN)>
    <!ELEMENT PERSETUJUAN (TEXT|PENYETUJU)>
      <!ELEMENT PENYETUJU (#PCDATA)>
      <!ATTLIST PENYETUJU NO ID #REQUIRED>
    <!ELEMENT MEMUTUSKAN (MENETAPKAN)>
    <!ELEMENT MENETAPKAN (#PCDATA)>

<!ELEMENT BATANG_TUBUH (BAB+|PASAL+)>
  <!ELEMENT BAB (JUDUL_BAB, (BAGIAN+|PASAL+))>
    <!ATTLIST BAB NO ID #REQUIRED
      ID ID #REQUIRED>
    <!ELEMENT JUDUL_BAB (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BAGIAN (JUDUL_BAGIAN, TEXT, (PARAGRAF+|PASAL+))>
    <!ATTLIST BAGIAN NO ID #REQUIRED
      ID ID #REQUIRED>
    <!ELEMENT JUDUL_BAGIAN (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PARAGRAF (JUDUL_PARAGRAF, PASAL+)>
    <!ATTLIST PARAGRAF NO ID #REQUIRED
      ID ID #REQUIRED>
    <!ELEMENT JUDUL_PARAGRAF (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PASAL (KALIMAT|AYAT+)>
    <!ATTLIST PASAL NO ID #REQUIRED
      ID ID #REQUIRED>
  <!ELEMENT AYAT (TEXT, (ANGKA+|HURUF+), REF+)>
    <!ATTLIST AYAT NO ID #REQUIRED
      ID ID #REQUIRED>
  <!ELEMENT ANGKA (TEXT, HURUF*, REF+)>
    <!ATTLIST ANGKA NO ID #REQUIRED
      ID ID #REQUIRED>
  <!ELEMENT HURUF (TEXT, ANGKA*, REF+)>
    <!ATTLIST HURUF NO ID #REQUIRED
      ID ID #REQUIRED>
```

(lanjutan)

```
<!ELEMENT PENUTUP (RUMUSAN_PERINTAH, DISAHKAN, DIUNDANGKAN,
LEMBARAN)>
  <!ELEMENT RUMUSAN_PERINTAH (TEXT, REF+)>
  <!ELEMENT DISAHKAN (LOKASI, WAKTU, OLEH)>

<!ELEMENT DIUNDANGKAN (LOKASI, WAKTU, OLEH)>
  <!ELEMENT LOKASI (#PCDATA)>
  <!ELEMENT WAKTU (TANGGAL, BULAN, TAHUN)>
    <!ELEMENT TANGGAL (#PCDATA)>
    <!ELEMENT BULAN
(Januari|Pebruari|Maret|April|Mei|Juni|Juli|Agustus|
September|Nopember|Desember)>
  <!ELEMENT TAHUN (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OLEH (POSISI, NAMA)>
    <!ELEMENT POSISI (#PCDATA)>
    <!ELEMENT NAMA (#PCDATA)>
  <!ELEMENT LEMBARAN (TAHUN, NOMOR)>

<!ELEMENT KALIMAT (TEXT, (ANGKA+|HURUF+), REF+)>
<!ELEMENT REF EMPTY>
  <!ATTLIST REF ID ID #REQUIRED>
<!ELEMENT TAHUN (#PCDATA)>
<!ELEMENT NOMOR (#PCDATA)>
<!ELEMENT TEXT (#PCDATA)>
```

Lampiran 2. Kueri yang digunakan

1. pemutusan hubungan kerja
2. upah pekerja buruh
3. arbitrase
4. kecelakaan kapal tenggelam
5. kecelakaan kereta api
6. lisensi paten
7. sanksi kampanye
8. gugatan pengadilan tata usaha negara
9. anggota dpr pidana persetujuan presiden
10. penggantian antarwaktu anggota dpr
11. tugas dan wewenang kepala daerah
12. kegiatan usaha hilir minyak bumi
13. merek dagang
14. nilai simpanan nasabah dijamin lps
15. kegiatan usaha bank syariah
16. mudharabah bank syariah
17. tugas pokok polisi
18. pembubaran badan hukum pendidikan
19. syarat hakim mahkamah agung
20. wewenang komisi yudisial
21. batas waktu rekapitulasi suara pemilu
22. penanggulangan wabah penyakit menular
23. persyaratan anggota angkatan bersenjata republik indonesia
24. surat izin mengemudi
25. ekstradisi
26. treaty of mutual respect friendship and cooperation between the republic of indonesia and the independent state of papua new guinea
27. mencabut tentang referendum lembaran negara tahun 1985 nomor 29 tambahan lembaran negara nomor 3288
28. peraturan pemerintah pengganti tentang pemberantasan tindak pidana terorisme
29. perjanjian republik indonesia australia kerangka kerja sama keamanan
30. perjanjian bantuan timbal balik masalah pidana
31. daerah hukum pengadilan tinggi agama maluku utara
32. undang-undang perubahan ketiga undang-undang tentang susunan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat
33. ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja
34. belanja hibah
35. penggunaan bahan kimia larangan penggunaan bahan kimia senjata kimia
36. pidana penjara denda pencemaran nama baik
37. perlindungan konsumen hak
38. tindak pidana pencucian uang

39. jenis usaha perasuransian
40. tindak pidana korupsi
41. komisi penyiaran indonesia
42. standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi
43. tugas komisi pemberantasan korupsi
44. transplantasi organ tubuh jaringan
45. pengangkatan anak agama orang tua
46. analisis mengenai dampak lingkungan hidup
47. penyalahgunaan obat dan psikotropika
48. penyelenggaraan ibadah haji
49. fidusia adalah
50. hipotek

